

Anwar Ibrahim Menerima Vaksin Covid-19

KUALALUMPUR(IM) - Pemimpin oposisi Malaysia yang juga Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim menerima suntikan vaksin Covid-19. Ia mendorong kesadaran masyarakat untuk terlibat serta dalam vaksinasi.

“Saya telah selesai menerima suntikan vaksin Covid-19 di Klinik Kesehatan Kuala Lumpur pagi ini,” ujar Anwar Ibrahim melalui laman Facebook-nya di Kuala Lumpur, Selasa (16/3).

Dia menyampaikan terima kasih kepada tim petugas pengobatan yang dipimpin Dr Murugesu Raju atas layanan serta kerja sama baik yang diberikan sepanjang proses berlangsung. Dia mengharapkan masyarakat untuk segera mendaftar melalui aplikasi

MySejahtera dan tidak boleh lengah.

“Saya usul mempermudah proses pendaftaran dan taklala mengambil vaksin, jangan terlalu rumit dengan formulir dan ulasan,” katanya.

Dia juga berharap rakyat sadar akan kepentingan vaksin dan meningkatkan pengetahuan tentangnya. “Penting juga untuk kita keluar dari zaman sakit ini dan seterusnya dapat kita membangun serta memulihkan ekonomi kita,” katanya.

Sebelumnya, Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi juga telah menerima suntikan vaksin Covid-19. Hingga 15 Maret 2021 sebanyak 321,331 dosis vaksin Covid-19 sudah diberikan di 16 negara bagian seluruh Malaysia. ● gul

Buka Kedutaan di Yerusalem, Kosovo Tuai Kecaman

YERUSALEM(IM) - Kosovo, negara mayoritas Muslim, menuai kecamaran dari berbagai pihak setelah membuka kedutaan mereka di Yerusalem. Negara Eropa itu menjadi negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Kosovo, yang secara resmi membuka kedutaan pada hari Minggu, melakukan langkah itu sebagai imbalan untuk pengakuan Israel atas kemerdekaan yang dideklarasikannya pada 2008 setelah perang dengan Serbia pada 1990-an.

Palestina, yang mengklaim bagian timur Yerusalem sebagai ibu kota negara masa depan mereka, telah dengan keras mengancam Kosovo atas tindakan tersebut.

“Ini adalah pelanggaran hukum internasional,” kata Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dikutip dari kantor berita Wafa, Selasa (16/3).

Faksi Hamas yang menguasai Jalur Gaza yang

diblokade Israel juga mengancam Kosovo, menuduhnya kebijakannya “bias yang mengerikan” terhadap Israel.

Turki telah mengkritik pembukaan kedutaan itu pada hari Minggu.

Pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania Dhaifallah Ali Al-Fayez mengatakan setiap langkah untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel adalah “nol dan tidak memiliki efek hukum.”

Pembukaan kedutaan resmi pada hari Minggu termasuk upacara singkat di mana bendera Kosovo dikibarkan di depan gedung di Yerusalem.

Serbia telah menolak untuk mengakui kemerdekaan bekas provinsi itu, jadi meskipun Kosovo sekarang telah diakui oleh sebagian besar dunia Barat, penolakannya oleh sekutu utama Beograd—Rusia dan Tiongkok—telah membuatnya tidak dapat masuk ke PBB.

Israel resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Kosovo pada bulan lalu. ● ans



LOKASI LEDAKAN DI KABUL - AFGANISTAN

Seorang petugas Afghanistan memeriksa minibus rusak setelah sebuah ledakan di Kabul, Afghanistan, Senin (15/3).

Korban Tewas Demonstrasi Antikudeta di Myanmar Tembus 180 Orang

Negara-negara dunia dan organisasi Internasional semakin keras menyuarakan kecaman dan desakan agar kekerasan di Myanmar segera dihentikan.

YANGON(IM) - Lebih dari 180 orang telah tewas oleh pasukan keamanan dalam beberapa pekan demonstrasi memprotes kudeta militer di Myanmar, kata kelompok aktivis. Negara-negara dunia dan organisasi Internasional semakin keras menyuarakan kecaman dan desakan agar kekerasan di Myanmar segera dihentikan.

“Korban meningkat secara drastis,” kata Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) dalam pernyataan Selasa (16/3) sebagaimana dilansir TRT World. Kelompok itu menambahkan bahwa lebih dari 180 orang telah tewas sejak kudeta 1 Februari.

Setidaknya 20 orang tewas pada Senin (15/3), menurut

AAPP, menambahkan bahwa 74 orang tewas pada Minggu (14/3), hari paling berdarah sejauh ini.

Sementara sebagian besar kematian Senin adalah demonstran anti-kudeta, beberapa warga sipil yang “bahkan tidak berpartisipasi dalam protes” juga dilaporkan tewas, jelas AAPP.

PBB mengutuk kekerasan terbaru itu dan mengatakan setidaknya 138 orang telah tewas sejak 1 Februari.

“Ini termasuk 38 orang yang tewas kemarin (Minggu), mayoritas di daerah Hlaing Thayer di Yangon, sementara 18 orang tewas pada Sabtu (13/3),” kata Stephane Dujaric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Angka PBB tidak menyebutkan korban yang jatuh pada Senin.

Seorang juru bicara junta tidak menjawab panggilan yang meminta komentar dan kantor berita Reuters mengatakan tidak dapat secara independen mengonfirmasi semua korban.

Sejauh ini para jenderal Myanmar tidak menunjukkan tanda-tanda mengindikasikan seruan untuk menahan diri, dan pendukung pemimpin terpilih yang ditahan Aung San Suu Kyi tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dalam menghadapi kekerasan yang meningkat.

Sementara itu Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengancam kekerasan militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa yang oleh Washington disebut “tidak bermoral dan tidak dapat dipertahankan.”

Kecaman ini disampaikan setelah pasukan keamanan junta membantai puluhan para pengunjuk rasa dengan peluru pada Minggu, hari paling berdarah sejak kudeta 1

Februari.

Para pendukung pemimpin terpilih yang ditahan Aung San Suu Kyi turun ke jalan lagi kemarin meskipun puluhan pengunjuk rasa tewas pada hari Minggu (14/3).

Dikutip Reuters, Selasa (16/3).

Pada Minggu malam, 38 pengunjuk rasa tewas di Hlaingthaya dan lokasi lain di Yangon akibat kekerasan oleh pasukan keamanan junta setelah para demonstran anti-kudeta menyerang pabrik-pabrik Tuongkok di negara itu. Seorang polisi Myanmar juga tewas dalam insiden itu.

Aset-aset Tiongkok di Myanmar jadi sasaran amukan para demonstran setelah Beijing dianggap terlalu meremehkan kudeta militer di negara Asia Tenggara itu.

Kedutaan Besar Tiongkok di Myanmar mengatakan banyak staf mereka terluka dan terperangkap dalam serangan pembakaran oleh penyerang tak dikenal di pabrik garmen di Hlaingthaya. Beijing telah

meminta Myanmar untuk melindungi properti dan warga Tiongkok.

Media lokal melaporkan ketika asap membubung dari kawasan industri, pasukan keamanan menembaki pengunjuk rasa di pinggiran kota yang merupakan rumah bagi para migran dari seluruh negeri.

“Mengerikan. Orang-orang ditembak di depan mata saya. Itu tidak akan pernah meninggalkan ingatan saya,” kata seorang jurnalis foto di tempat kejadian yang tidak ingin disebutkan namanya, seperti dikutip Reuters, Senin (15/3).

Darurat militer diberlakukan di Hlaingthaya dan distrik lain di Yangon, pusat komersial Myanmar dan bekas ibu kota.

Televisi Myawaddy yang dikelola tentara mengatakan pasukan keamanan bertindak setelah empat pabrik garmen dan pabrik pupuk dibakar dan sekitar 2.000 orang telah menghentikan mesin pemadam kebakaran untuk menjangkau mereka. ● tom

Kim Yo-jong: Jika AS Mau Tidur Tenang Jangan Picu Keributan

PYONGYANG(IM) - Adik pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un, Kim Yo-jong, memperingatkan pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk menahan diri dari “menyebabkan bau busuk” di tanah Korea Utara jika menginginkan perdamaian.

Menurut koresponden Reuters; Josh Smith, Kim Yo-jong mengancam latihan militer yang sedang berlangsung di negara tetangga; Korea Selatan (Korsel). “Jika Seoul berani melakukan tindakan yang lebih provokatif, kami dapat mengambil tindakan khusus dengan tegas membatalkan perjanjian militer Korea Utara-Korea Selatan,” katanya.

“Kami mengambil kesempatan ini untuk memperingatkan admin AS yang baru. Berusaha keras untuk mengeluarkan bau busuk di tanah kami,” kata Kim Yo-jong, seperti dikutip KCNA, Selasa (16/3). menyebabkan bau pada langkah pertama,” paparnya.

“Mungkin, mereka mengharapkan ‘penilaian yang fleksibel’ dan ‘pengertian’ dari kami, tetapi itu memang konyol, kurang ajar dan bodoh,” lanjut adik Kim Jong-un tersebut merujuk pada latihan militer AS dan Korsel.

“Latihan perang dan permusuhan tidak akan pernah bisa berjalan dengan dialog dan kerja sama,” katanya menambahkan.

Latihan militer tahunan AS-Korea Selatan dimulai Senin lalu, dilakukan dalam format pelatihan pascakomando yang disimulasikan komputer dan diperkirakan akan berlangsung hingga 18 Maret.

Pyongyang telah lama menuntut Seoul dan Washington untuk menghentikan latihan militer mereka, menjelaskan bahwa hal itu sebagai tanda kebijakan permusuhan AS dan penghalang normalisasi hubungan intra-Korea, serta hubungan Korea Utara dengan AS.

Pada saat yang sama, Seoul mengatakan pihaknya berharap Pyongyang akan menunjukkan pendekatan yang bijaksana dan fleksibel terhadap latihan militer gabungan. Korea Selatan dan AS melakukan latihan militer tahunan selama musim semi dan musim panas, serta latihan kecil sepanjang tahun.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia dan Pasifik Sung Kim mengatakan pekan lalu bahwa Washington akan menyelesaikan tjuan kebijakan mereka terhadap Korea Utara di masa mendatang.

Akhir pekan ini, Menteri Luar Negeri dan Menteri Perumahan AS, Antony Blinken dan Lloyd Austin, memulai perjalanan luar negeri besar pertama kepresidenan Joe Biden untuk memperkuat aliansi dengan Jepang dan Korea Selatan.

Pendahulu Biden, Donald Trump, telah mengadakan tiga pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, namun kedua belah pihak tidak pernah mencapai terobosan dalam denuklirisasi karena kebutuhan dalam pencabutan sanksi. Negosiasi nuklir menemui jalan buntu selama pertemuan puncak 2019 di Hanoi, ketika Trump tidak bersedia mencabut sanksi AS terhadap Korea Utara.

Karena kesulitan ekonomi yang ditimbulkan oleh sanksi AS, Pyongyang mengumumkan pada akhir 2019 bahwa mereka akan melanjutkan program senjata nuklirnya dan mencoba memberi lebih banyak tekanan pada Washington.

Militer Korea Selatan mengatakan bahwa pada 2019 saja, Pyongyang melakukan total 13 uji coba rudal dan memamerkan beberapa jenis rudal balistik baru, termasuk peluncur roket ganda super besar dan rudal balistik canggih yang diluncurkan kapal selam. ● gul

Dituduh Kudeta Morales, Mantan Presiden Bolivia Ditahan

SANTIAGO (IM) - Mantan presiden Bolivia Jeanine Anez mulai menjalani masa tahanan yang berlangsung empat bulan. Penyidik mengatakan, ia membantu kudeta untuk menggulingkan Evo Morales pada 2019.

“Peradilan menjadi instrumen penindasan partai berkuasa, sistem peradilan Bolivia tidak dalam posisi memberikan jaminan minimum untuk menggelar pengadilan yang adil, imparsiial dan proses yang tepat,” kata OAS dalam pernyataannya, Selasa (16/3).

Anez ditangkap setelah polisi menggerebek rumahnya Sabtu (13/3) pagi lalu di Kota Trinidad. Ia dipindahkan ke penjara perempuan di ibu kota La Paz. Jaksa pemerintah sosialis yang kembali berkuasa pada Oktober lalu mengatakan, Anez menggunakan sekutunya di pasukan keamanan untuk mendesak Morales mengundurkan diri.

Anez lalu menjadikan di-

rinya sendiri sebagai presiden sementara. Ia membantah semua dakwaan terhadapnya. Ia mengatakan, dakwaan-dakwaan itu persekusi politis dan bersikeras tindakannya sesuai konstitusi.

Pihak berwenang juga diperintahkan menangkap mantan menteri energi dan kehakimannya yang didakwa atas pasal terorisme, penghasutan, dan konspirasi untuk melancarkan kudeta. Polisi juga memiliki surat penangkapan untuk tokoh-tokoh masyarakat, mantan pejabat militer dan polisi.

Pada Ahad (14/3) lalu, Menteri Kehakiman Ivan Lima mengatakan, ia ingin mendakwa Anez dengan hukuman 30 tahun penjara. Ia berencana mengajukan tuntutan lain seperti pengajuan pinjaman senilai 350 juta dolar AS ke International Monetary Fund (IMF).

OAS yang mengawasi pemilihan 2019 dan menemukan

adanya kecurangan dalam pemilihan yang dimenangkan Morales, mendesak agar Anez dan menteri-menterinya dibebaskan. Mereka mendesak penyelidikan internasional yang imparsiial.

Dalam pernyataannya Amnesty International mengatakan penangkapan Anez serta sejumlah keputusan untuk menghentikan kasus terhadap beberapa anggota partai sosialis yang berkuasa mencerminkan ‘krisis impunitas’ yang sudah berlangsung puluhan tahun di Bolivia. Jaksa yang menangani kasus Anez, Pablo Gutierrez mengatakan ia dan timnya mengikuti ketentuan hukum.

Anez yang menjabat sebagai senator sayap kanan moderat mengambil alih kekuasaan usai Morales mundur untuk menanggapi tuntutan unjuk rasa yang kerap berujung dengan kekerasan. Demonstran mengklaim Morales mencurangi pemilu. ● ans



WATER AID AND SAND IN YOUR EYE

Potret pasir raksasa WaterAid and Sand In Your Eye terlihat di Pantai Whitby, Britain, Senin (15/3). Potret dengan lebar 6m oleh seniman Sand In Your Eye memperlihatkan seorang anak membawa air di tanah kering dan pecah di samping ombak pasang, untuk menyoroti dampak perubahan iklim terhadap akses warga kepada air.

Parlemen Inggris Ingin Masukkan Misogini dalam UU KDRT

LONDON(IM) - Anggota parlemen Inggris mengajukan amandemen Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Amandemen itu akan mewajibkan polisi Inggris dan Wales melacak kasus kekerasan bermotif misogini atau kebencian terhadap perempuan.

Majelis tinggi parlemen Inggris, House of Lords menggelar debat mengenai amandemen yang mendapat banyak dukungan ini. “Sudah waktunya bagi kami untuk berubah,” kata anggota parlemen dari Partai Buruh Stella Creasy yang mengajukan amandemen, seperti dikutip Voice of America, Selasa (16/3).

“Daripada memberitahu perempuan untuk tidak mengkhawatirkan kekerasan atau tetap tinggal di rumah pada malam hari bila mereka ingin aman, sudah waktunya untuk mengirim pesan perempuan juga dapat hidup dengan bebas dari rasa takut dilukai atau diserang oleh orang-orang yang mengincar mereka,” tambah Creasy.

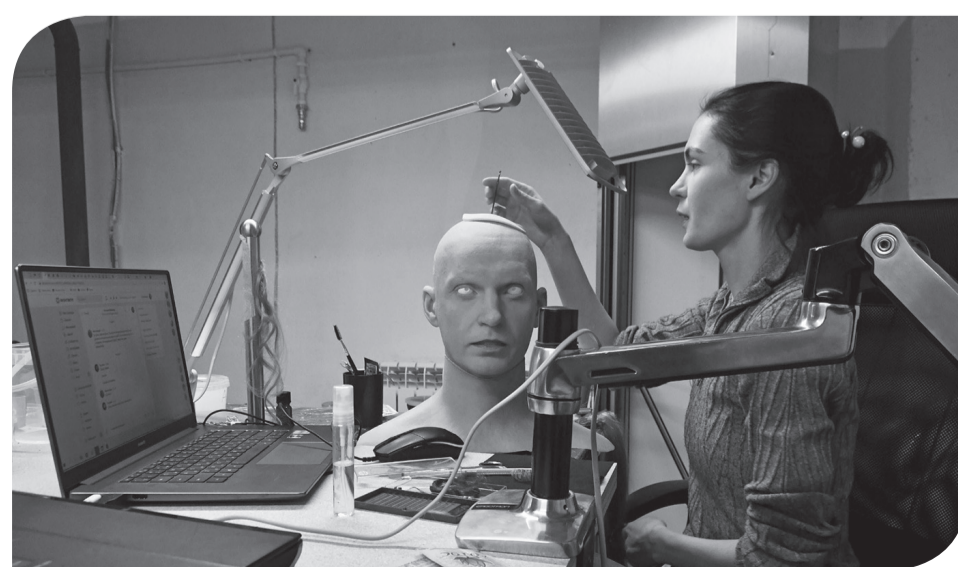
Hal itu diadani anggota parlemen dari Partai Buruh lainnya Alicia Kennedy.

“Ini langkah sederhana yang dapat kami ambil saat ini untuk mulai memastikan setiap perempuan merasa lebih aman di rumah atau di jalan,” kata Kennedy.

Amandemen itu didorong pembunuhan Sarah Everard yang diculik dan dibunuh dalam perjalanan pulang ke rumah pada 3 Maret lalu. Tersangka penculikan dan pembunuhannya, petugas polisi Wayne Couzens akan tampil di hadapan pengadilan Selasa ini.

Laporan lembaga pengawas peradilan Inggris, British Law Commission bulan September lalu menyimpulkan misogini harus dianggap diskriminasi terhadap kelompok lain. Di Inggris pelaku kejahatan atas dasar kebencian terhadap ras, agama, orientasi seksual, disabilitas dan identitas transgender mendapat hukuman yang berat.

Amandemen itu mendapat dukungan dari anggota partai konservatif dan berbagai sayap lainnya di parlemen. Begitu pula organisasi kemanusiaan di Inggris seperti Citizens U.K., U.N. Women U.K., dan Fawcett Society. ● gul



KEPALA ROBOT HUMANOID

Alexandra Chegodaeva, seorang asisten kepala departemen penelitian dan pengembangan Promobot, mengerjakan sebuah kepala robot humanoid di cabang perusahaan di timur jauh koa Vladivostok, Rusia, Senin (15/3).